

HAMZANWADI DAN GERAKAN KEBANGSAAN MELALUI PENDIDIKAN BERBASIS LOKAL BERMATRA NASIONAL

Khirjan Nahdi¹, Sitti Rohmi Djalilah², Musifuddin³, M. Deni Siregar⁴
Universitas Hamzanwadi^{1,2,3,4}
khirjan.nw@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menemukan pemikiran, institusionalisasi, dan agenda gerakan nasional yang dilakukan oleh Hamzanwadi di Lombok melalui pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi teks, konteks, dan hubungan teks dengan masyarakat. Data kajian dikumpulkan melalui teknik catatan terpilah atas usulan pahlawan nasional bagi Hamzanwadi. Data dianalisis menurut analisis sejarah dan hermeneutika sebagai kajian sejarah dan sosial. Hasil penelitian ini adalah 1) Hamzanwadi menginisiasi pemikiran nasional melalui pendidikan dan mendirikan lembaga pendidikan sebagai sarana penyadaran akan pentingnya kemandirian bangsa; 2) Hamzanwadi melabelkan lembaga pendidikan dengan sebutan Nahdlatul Wathan sebagai representasi pikiran gerakan kebangsaan atau gerakan tanah air; 3) Hamzanwadi mengembangkan pendidikan untuk semua dengan menginisiasi pendidikan kesetaraan melalui lembaga pendidikan untuk wanita. Simpulan penelitian ini bahwa, Hamzanwadi telah menginisiasi dan melakukan gerakan kebangsaan melalui pendidikan, institusionalisasi kelembagaan sebagai representasi pikiran dan tindakan kebangsaan, dan menawarkan pikiran dan tindakan kesetaraan untuk pria dan wanita. Hingga saat ini, pikiran, tindakan dan pelebagaan tersebut masih dikenal melalui nama organisasi dan lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan sebagai khazanah lokal bermatra nasional.

Kata kunci: Hamzanwadi, Kebangsaan, Pendidikan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find the thoughts, institutionalization, and agenda of the national movement carried out by Hamzanwadi in Lombok through education. This research uses the method of text documentation, context, and the relationship between the text and the community. The study data was collected through a disaggregated note technique on the proposal of a national hero for Hamzanwadi. Data were analyzed according to historical analysis and hermeneutics as historical and social studies. The results of this study are: 1) Hamzanwadi initiated national thinking through education and established educational institutions as a means of raising awareness of the importance of national independence; 2) Hamzanwadi labels educational institutions as Nahdlatul Wathan as a representation of the thoughts of the national movement or the movement of the homeland; 3) Hamzanwadi develops education for all by initiating equality education through educational institutions for women. It was concluded that, Hamzanwadi had initiated and carried out a national movement through education, institutionalized institutionalization as a representation of national thoughts and actions, and offered thoughts and actions of equality for men and women. Until now, these thoughts, actions and institutionalization are still known through the name of the Nahdlatul Wathan educational organization and institution as local treasures with national dimensions.

Keywords: Education, Hamzanwadi, Nationality

PENDAHULUAN

Tiga cakupan penjelasan sejarah menurut Djoko Suryo (Kuntowijoyo, 2008) yakni menafsir dan memahami; penjelasan dalam waktu memanjang; dan peristiwa tunggal merupakan kesatuan atraktif sirkuler dalam menemukan, menafsirkan, dan memahami fakta dan nilai sejarah. Fakta dan nilai sejarah menurut Walsh, masih dalam Kuntowijoyo, dapat bersumber dari persona, peristiwa, dan artefak yang dapat dinarasikan dan bentuk *colligation*, plot, dan struktur sejarah. Pahlawan Nasional asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (dalam tulisan ini disingkat Hamzanwadi) dideskripsikan sebagai *unity* sejarah menyangkut pikiran, tindakan, dan realitas fisik (artefak) dalam kurun waktu panjang dengan peristiwa mandiri yang berproses berdasarkan relasi kontekstualnya. Selain sebagai *unity* sejarah, persona Hamzanwadi dapat dipahami menurut padangan *cultural studies* karena kehadirannya berkenaan dengan seluruh kehidupan manusia dalam konteks manusia menyejarah. *Cultural studies* dianggap relevan untuk menjelaskan fenomena dinamika kebangsaan yang digagas, digerakkan, dan dipandu oleh Hamzanwadi. Mengikuti pandangan Kutha Ratna (2007), relevansi dimaksud terkait dengan realitas kultural, perubahan dan perbaikan aspek-aspek kultural, dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Cakupan sejarah yang disebutkan Djoko Suryo dan *cultural studies* dari Kutha Ratna merupakan proposisi metodologis yang dapat membantu deskripsi realitas sejarah sebelumnya untuk fungsi-fungsi *verstehen* masa kini dan masa depan melalui realitas bentuk

(artefak), fungsi, dan makna. Proses metodologis keduanya terjadi secara eklektis tanpa menampakkan dominasi masing-masing.

Melalui cakupan sejarah dan *cultural studies*, kajian ini bertujuan menemukan pikiran dan bentuk institusionalisasi agenda kebangsaan oleh Hamzanwadi melalui pendidikan pada masing-masing fase kebangsaan Indonesia. Pendidikan yang ditempuh Hamzanwadi penting dalam memahami konteks yang dialaminya. Azra (1999) menyebutkan, melalui proses pendidikan dipahami maksud dan tujuan proses penjajahan yang diawali dari maksud perniagaan, penyebaran agama, dan selanjutnya kolonialisasi. Bentuk institusionalisasi juga penting karena agenda-agenda pergerakan kebangsaan yang melahirkan nasionalisme, sebagaimana disebutkan Ricklefs (1998); Heryanto, (2019); dan Said (2017) bahwa kebangsaan merupakan konstruksi berdasarkan penghayatan atas satuan sosial modern yang dinamakan nasion, yang melahirkan projek bersama untuk masa kini dan masa depan. Pada beberapa kasus, kebangsaan dikaitkan dengan ide dan gerakan penolakan terhadap orientalisme ‘Barat’ yang melahirkan pengetahuan dengan landasan ideologi dan kepentingan kolonial melalui wacana ‘Timur’, yang puncaknya pada kemerdekaan dan masa pasca kolonial. Karena itu, pendidikan yang ditempuh Hamzanwadi, sebagaimana disebutkan Noor, dkk (2004); Nahdi (2013); dan Fogg (2019) penting dikemukakan, berikut pengaruhnya terhadap pikiran dan sikap kebangsaan Hamzanwadi melalui inisiasi proses pendidikan pada fase sejarah selanjutnya.

Pikiran dan gerakan kebangsaan Hamzanwadi dapat dipahami melalui proses

institusionalisasi gerakan melalui sebutan-sebutan organisasi yang memayungi pergerakannya. Penamaan organisasi dan gerakan tidak saja sekadar sebagai atribut, tetapi memiliki makna dan pesan dalam konteks perjuangan pergerakan kebangsaan. Dalam konteks sejarah modern Indonesia, Abdullah; Djoko Suryo; Hariyono (Fattah, 2017) menyebutkan, diskusi dan narasi tentang kebangsaan, termasuk yang diinisiasi dan digerakkan oleh Hamzanwadi merupakan ide dan agenda kebangsaan dalam konteks negara-bangsa sebelum kemerdekaan dan empat dasawarsa setelah kemerdekaan.

Konteks institusionalisasi ini membutuhkan penjelasan tentang lembaga atau organisasi yang menaungi pikiran dan agenda kebangsaan Hamzanwadi pada fase sejarah sebagaimana disebutkan Abdullah, Djoko Suryo, dan Hariyono. Masalah ketiga tentang agenda kebangsaan merupakan akumulasi kesadaran atau habitus, yang menurut Baskhar (Salim, 2002); Bourdieu (1986); (Ritzer, 2008) harus diwujudkan dalam tindakan nyata sebagai tanggung jawab sejarah masa kini (ketika Hamzanwadi memulai agenda kebangsaan) dan masa depan dalam dinamika sosial yang terus bergerak.

Kajian ini menjadi sangat urgen karena dua alasan. Pertama, kondisi kebangsaan kita, sebagaimana Muladi (2019) sedang dalam masalah. Kondisi kontekstual menunjukkan kecenderungan untuk menafikan sejarah bangsa dalam hal kebhinekaan sebagai satu bentuk masalah kebangsaan tersebut. Kedua, kesadaran tentang Indonesia yang dibangun melalui entitas lokal menjadi kabur akibat dinamika kebangsaan modern yang cenderung menempatkan

aspek politik menjadi panglima dalam konteks kebangsaan kita. Pengetahuan tentang khazanah lokal yang memiliki matra nasional, sebagaimana Hofstede (Rosa et al, 2010) merupakan kelokalan yang setara dengan pikiran dan agenda kebangsaan dalam konteks Indonesia. Artinya, pemahaman tentang pendidikan Indonesia pada era modern saat ini merupakan kelanjutan dari inisiasi pendidikan dalam sejarah Indonesia secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Data kajian yang mendukung temuan pemikiran dan institusionalisasi agenda kebangsaan oleh Hamzanwadi melalui pendidikan bersumber dari artefak sejarah sebagai sumber sejarah berbentuk teks, konteks, dan hubungan teks dengan masyarakat. Keseluruhan data bersumber dari dokumen resmi usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Hamzanwadi. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi melalui pengelompokan teks sesuai tujuan kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan sejarah untuk menemukan pikiran dan institusionalisasi kebangsaan melalui pendidikan, sebagaimana dikemukakan Ritzer (2008), diasumsikan bahwa teks sejarah dipahami dalam hubungan konteks sosial masa lampau, kini, dan masa depan. Analisis data menggunakan metode dialektika seperti dilakukan (Hauser, 1985) dibantu *verstehen* dalam tradisi hermeneutika Gadamer (Darmaji, 2014); (Kuntowijoto, 2008) dan (Kartodirdjo (2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Awal dan Kesadaran Realitas Lokal

Hamzanwadi menempuh pendidikan formal Sekolah Rakyat Negara (lulus tahun 1919 M). Perspektif psikologi perkembangan, usia lulusan Sekolah Rakyat setara dengan lulusan SD/MI dan berada pada usia 11-12 tahun. Sekolah Rakyat Negara ketika itu (1919 M) masih di bawah kontrol Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melalui Politik Etik. Kondisi peradaban berdasarkan indikator pendidikan memperoleh dampak kurang menguntungkan akibat kebijakan politik etik Hindia Belanda. Kondisi ini menjadi sebuah tesis bahwa pada awalnya, orang-orang Belanda datang ke Nusantara untuk mencari barang dagangan. Setelah berhasil, mereka berupaya menguasai dan menjajah daerah-daerah yang didatangi tersebut. Secara Hermeneutik dipahami bahwa kondisi lokal dengan konteks kontrol kolonial mulai disadari sebagai kondisi yang tidak menguntungkan dalam proses modernisasi peradaban, termasuk melalui pendidikan keagamaan.



Gambar 1. Konstruksi Kesadaran konteks lokal melalui wasiat
(Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)

Karenanya, benarlah apa yang Hamzanwadi sampaikan, “tidaklah mungkin kita dapat menjalankan

proses pendidikan dan tindakan keberagamaan dalam kondisi tertekan, tidak nyaman, dan penuh dengan intimidasi atau tidak merdeka”. Jika konsep kebangsaan dipahami sebagai suatu kesadaran individu dan kolektif tentang bangsa (sebut Indonesia) menyangkut kemerdekaan, ideologi, kesejahteraan, persatuan, kebudayaan, dan aspek kecerdasan lainnya, jelas bahwa Hamzanwadi menyadari kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi proses-proses modernisasi peradaban dalam bentuk dan tindakan apa pun. Konteks lokal yang melingkupinya telah melahirkan kesadaran bahwa bangsa ini dalam kondisi terjajah, terintimidasi, tertindas, dan itulah penyebab dari semua keterbelakangan peradaban. Langsung atau tidak langsung, kesadaran ini akan melahirkan kesadaran lain, yakni kesadaran tentang pentingnya merdeka sebagai suatu bangsa. Namun demikian, merdeka adalah suatu konteks membebaskan semua atribut kemanusiaan yang tidak seimbang. Merdeka harus dimaknai sebagai suatu kesadaran tentang semuanya adalah sama. Merdeka adalah milik kolektif, sehingga harus lahir dari kesadaran kolektif sebagai bangsa.

Merdeka membutuhkan instrumen lain sebagai instrumen penyadaran. Hal yang tergambar dalam diri Hamzanwadi bahwa instrumen penyadaran pentingnya merdeka adalah pendidikan. Variabel rendahnya pendidikan karena dibatasi akses pendidikan mengakibatkan individu dan kolektif tidak memiliki kapasitas untuk memikirkan alternatif perbaikan nasibnya. Karena itu, harus disadarkan melalui proses pendidikan, sehingga kesadaran akan kondisi keterjajahan itulah sebagai hasil dari proses pendidikannya.

Pendidikan dalam konteks (ruang dan waktu sejarah ini) menjadi instrumen penayadaran. Sebagai proses, pendidikan adalah relasi antar manusia dengan pola saling memberi (pemberi-penerima-pemberi). Konsep memberi oleh pemberi harus memiliki entitas yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih komprehensif dibanding penerima. Dalam hal kapasitas individual, Hamzanwadi tidak mungkin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya bangsa yang merdeka dengan usia yang relatif masih anak-anak (11-12 tahun) dan lulusan sekolah dasar. Kesadaran inilah yang melahirkan pentingnya pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses penyadaran akan kondisi keterjajahan, dan berikutnya melahirkan kesadaran untuk merdeka. Inilah konteks yang menuntutnya untuk belajar lebih banyak pada institusi yang lebih tinggi.

Pendidikan di Madrasah *Ash-Shaulatiyah* dan Konteks Habitiasi

Pendidikan selanjutnya yang ditempuh Hamzanwadi di Madrasah *ash-Shaulatiyah* di Makkah. Pemahaman terhadap gerakan kebangsaan Hamzanwadi berdasarkan sistem pendidikan, idealisme, pendiri dan pendirian, kurun waktu pendidikan, dan asal santri/murid di Madrasah *ash-Shaulatiyah* berdasarkan perspektif hermeneutik. Dalam sistem pendidikan, salah satu sub-sistem yang penting adalah kurikulum atau isi pembelajaran yang lazim tampil melalui mata pelajaran-mata pelajaran. Jelas bahwa mayoritas substansi kurikulum Madrasah *ash-Shaulatiyah* berkaitan dengan agama (Islam). Islam sebagai agama dan keyakinan memiliki beberapa

pandangan mendasar tentang manusia. Salah satunya tersebut dalam QS. *adz-Dzaariyaat*, 56: “Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribada kepadaku”. Secara etnografis ayat ini menunjuk pada realitas bahwa semua manusia (tanpa menyebut Jin) adalah sama, yakni bertanggung jawab untuk beribadah kepada-Nya melalui praktek-praktek ketakwaan. Kesamaan tanggung jawab ini menunjuk pada kesamaan status di mata sesama (*hablumminannaas*). Intinya, kurikulum pendidikan di Madrasah *ash-Shaulatiyah* secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan substansi kesetaraan, kesejajaran, dan kesamaan hak dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan.



Gambar 2. Tradisi Pesantren dalam pendidikan Indonesia
(Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)

Pada saat yang sama, semua manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama atas apa yang ditakdirkan-Nya, termasuk terhadap tanah air dan bangsa di mana tanggung jawab kepada Tuhan itu ditunaikan (mengelola dan memanfaatkan untuk kepentingan ibadah kepada-Nya). Tidak boleh suatu bangsa, suatu kelompok, atau individu merasa paling berhak dalam hal memanfaatkan bumi dan tanah air dengan dalih dan cara apa pun, apalagi perampasan,

penindasan, dan penjajahan. Dalam konteks ini, tergambar bahwa Hamzanwadi sudah meletakkan fondasi pemikiran bahwa keberagaman (Islam) dan kebangsaan menjadi dua hal yang sejajar. Agama (Islam) dengan ajaran kesejajaran ummat manusia menjadi acuan dalam membentuk suatu bangsa. Suatu bangsa akan terbentuk bila setiap entitas kebangsaan berada sejajar dan merdeka, sehingga kemerdekaan menjadi keniscayaan dalam membentuk peradaban suatu bangsa.

Idealisme pendidikan di Madrasah *ash-Shaulatiyah* (dalam sistem pendidikan Indonesia dikenal sebagai visi pendidikan) tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Makkah, termasuk pendidikan ketika itu. Makkah adalah negara kerajaan, yang tentu “alergi” dengan pandangan-pandangan kesetaraan dan kesejajaran. Sebagai negara kerajaan, tentu Makkah memiliki pandangan yang berbeda tentang institusi agama (Islam) dan negara. Tidaklah mengherankan jika Madrasah *ash-Shaulatiyah* menjadi salah satu madrasah yang dianggap tidak *mainstream* dalam tradisi Makkah. Madrasah inilah satu-satunya institusi pendidikan yang mengajarkan konsep keberagaman yang strategis dalam memandu proses berbangsa dan bernegara. Bagus kiranya kita menambah wawasan kita bahwa semakin tinggi kapasitas keilmuan keberagaman lulusan Madrasah *ash-Shaulatiyah* sejajar dengan kesadaran kebangsaannya. Kesadaran ini memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan konteks yang melingkupinya saat itu. Jika suatu bangsa belum menjelma menjadi suatu bangsa merdeka maka kesadaran yang terbangun adalah kemerdekaan. Jika suatu bangsa sudah merdeka,

kesadaran yang terbangun adalah agenda mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan menjadi aktivitas meletakkan posisi manusia (makhluk) pada posisi yang sama dalam pandangan Tuhannya (Allah) sebagaimana maksud QS. *adz-Dzaariyaat* 56 (Kementrian Agama RI, 2009).

Madrasah *ash-Shaulatiyah* didirikan oleh *Syeikh Rahmat Allah*, seorang ulama imigran dari Delhi-India tahun 1919 M. India merdeka pada 15 Agustus 1947, artinya pada sebelum ini, India masih menjadi jajahan Kerajaan Inggris, sebagaimana halnya Indonesia sebelum 17 Agustus 1945 menjadi jajajahan Belanda. *Innercontext* yang dapat dipahami dari *Geisteswissentchaften Syeikh Rahmat Allah* secara hermeneutik, bahwa *Syeikh Rahmat Allah* berasal dari negara terjajah, yang merasakan sulitnya mengembangkan pikiran-pikiran dan kegiatan keberagaman. Pikiran *Inner context Geisteswissentchaften* inilah yang ingin ditularkan kepada murid-muridnya melalui madrasah ini. Tafsir ini bisa saja diperdebatkan, tapi inilah versetehen yang dapat ditawarkan berdasarkan kausalitas antara *inner context Syeikh Rahmatullah, Geisteswissentchaften*, konteks waktu, dan peristiwa yang terjadi dalam konteks waktu tersebut. Maksudnya, ada kesamaan pikiran dan pengalaman sebagai anak bangsa yang berasal dari dunia terjajah dengan berbagai dinamikanya, *Syeikh Rahmatullah* (India) dan Hamzanwadi (Lombok-Indonesia). Dan, dinamika itulah yang melahirkan ide penyadaran melalui proses pendidikan. Jika habitus (proses habituasi) dipahami sebagai disposisi proses mental-kognitif dalam konteks objektif sejarah (personal dan kolektif)

dipahami bahwa kesadaran akan nasib bangsa yang terjajah dan harus merdeka menjadi semakin subur dalam proses pergumulan keilmuan di Madrasah *ash-Shaulatiyah* ketika itu. Pada kurun waktu tersebut, merdeka masih merupakan cita-cita, dan cita-cita tersebut membutuhkan instrumen pendidikan. Benarlah, pada akhirnya ketika Hamzanwadi kembali ke tanah air (1933), dan mendirikan instrumen penyadaran keterjajahan, dan pentingnya kemerdekaan dengan mendirikan Pesantren *al-Mujahidin* (1934) sebagai cikal bakal Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (disingkat NWDI), Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (disingkat NBDI) dan Nahdlatul Wathan (disingkat NW).

Rekan-rekan seperguruan Hamzanwadi di Madrasah *ash-Shaulatiyah* sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang (istilah studi pembangunan) dan dalam kurun waktu tersebut beberapa di antaranya masih menjadi negara koloni kolonial. Pada generasi sebelumnya, santri Madrasah *ash-Shaulatiyah* adalah KH Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Tokoh ini sangat populer sebagai tokoh pergerakan kebangsaan pada era sebelum kemerdekaan. Jika meletakkan relasi kedua tokoh ini dalam posisi sejajar (pikiran dan tindakan) sebagaimana kita memahami "aku dalam engkau" tidaklah berlebihan jika kedua tokoh ini mengalami proses *inner context* yang sama, merasakan nuansa kultural yang sejajar, sehingga melahirkan aksi dan gerakan yang sama, yakni gerakan kebangsaan yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Dan, kita dapat menyaksikan hasil dari proses tersebut melalui berbagai catatan sejarah pergerakan bangsa; sebelum merdeka, ketika merdeka, hingga saat

ini dalam konteks ke-Indonesiaan kita sebagai bangsa.

Institusionalisme Ide Kebangsaan melalui Nama Institusi sesuai Realitas Lokal

Shakespeare pernah berucap, "what's in a name"? Agak sulit memahami maksud Shakespeare berucap demikian karena contohnya adalah bunga mawar, jika diberi nama apa pun tetap harum. Bisa dipahami melalui realitas bahwa nama objek tidak selalu mencerminkan hakikat yang harus diemban oleh nama objek tersebut. Tidak selalu, berarti masih banyak objek yang juga menjadi cermin dari apa yang harus diembannya. Nama seringkali menjadi penanda sebuah cita-cita, awal kejadian, situasi/kontes, atau identitas fisik dan moral yang direfresentasikannya. *al-Mujahidin* (Arab) berarti 'pejuang'. Kata "pejuang", sebagaimana "revolusi", "ganyang", "merdeka", dan lainnya adalah kata-kata yang merefresentasikan konteks sosial kemasyarakatan ketika kata-kata tersebut mulai dipopulerkan. Demikian pula nama *al-Mujahidin* (pejuang) untuk pesantren pertama yang didirikan Hamzanwadi (1934, sebelum Indonesia merdeka) ada hubungannya dengan situasi/kontes saat itu dalam rangka memerdekakan Indonesia, dan para pelaku proses itu adalah para pejuang. Lagi-lagi kita menyandarkan simulasi pikiran kita pada proses reduksi kausalitas sejarah antara lahirnya *al-Mujahidin* (pejuang) dengan Madrasah NWDI tahun 1937. Kita beralih dulu ke tahun 1953 pada saat lahirnya NW. Pertanyaannya, mengapa sebutan NW dipopulerkan pada tahun 1953? Kita ketahui bahwa NW merupakan organisasi massa untuk mewadahi gerakan kebangsaan

mengisi kemerdekaan bidang sosial, dakwah, termasuk juga peluang berpolitik selain bidang pendidikan melalui NWDI dan NBDI. Jadi, NW dimaknai sebagai kelanjutan dari NWDI dan NBDI. Jika mereduksi sebutan nama, perjalanan waktu, dan peristiwa sejarah, nama NW sesungguhnya sudah muncul setelah tahun 1934 (kelahiran *al-Mujahidin*). Karena nama NW sangat kental dengan semangat para pejuang pergerakan kemerdekaan (NW sama dengan Kebangkitan Tanah Air), dan sangat mungkin dicurigai oleh Pemerintah Hindia Belanda, Hamzanwadi menyematkan NW dengan Diniyah Islamiyah sehingga menjadi NWDI. Tindakan ini sebagai upaya menyelamatkan keberlangsungan madrasah, selain upaya-upaya penyadaran atas kondisi keterjajahan, yang selanjutnya kesadaran akan pentingnya merdeka memang diinstrumentasikan melalui pendidikan agama (Islam). Untuk mengabadikan cita-cita, pikiran, gerakan pergerakan tanah air sebagai entitas menyejarah (the genuine, the change, dan the development), sebutan NW diabadikan sebagai nama organisasi NW (1953), dan lembaga pendidikan dikenal sebagai NWDI dan NBDI.

Terkait nama *al-Mujahidin* (pejuang) dan NW (pergerakan tanah air), bukanlah sebutan tanpa makna dan maksud dalam relasinya dengan peristiwa, kurun waktu, dan cita-cita sejarah. Nama-nama tersebut adalah pengabdian atas kejelasan sikap, harapan, dan tindakan untuk merdeka (sebelum merdeka), dan tindakan mengisi kemerdekaan (setelah merdeka). Tampak jelas bagi kita bahwa semuanya hadir sebagai realitas yang menyejarah dalam proses pendidikan, sosial, dan dakwah (untuk

mencerdaskan) anak bangsa sehingga menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain.

Kebangsaan, Makna Pendidikan yang Dinamis dan Setara

Sebagai pelaku sejarah Pergerakan Kebangsaan, Hamzanwadi adalah agen (thinker and story teller). Pemikiran yang menjadi ide dasar didirikannya NW tidak lain adalah kesadaran tugas dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di muka bumi, sebagaimana diajarkan agama Islam. Sebagai *thinker* dan *story teller*, Hamzanwadi memahami tidak semua orang tertindas menyadari ketertindasannya, bahkan kadang-kadang menganggapnya sebagai sesuatu yang *taken for granted*.



Gambar 3. Kesetaraan dalam hak pendidikan
(Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)

Melalui NW diharapkan masyarakat memiliki pandangan dunia dan sistem nilai baru sebagai *a world view and system values* dalam proses relasi dengan dunia eksternal (pendidikan), termasuk relasi dengan peradaban lain yang dalam perspektif sejarah disebut sebagai kesadaran keterjajahan dan kemerdekaan. Kehadiran NW untuk maksud perubahan tidak dimaknai sebagai proses aksi dalam struktur dengan mengubah semua tatanan struktur dan kultur masyarakat lokal secara

menyeluruh. Kehadiran bersifat akulturatif dengan melestarikan nilai lama yang bersifat positif (preservatif), dan memberikan sentuhan baru bagi nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dan tidak produktif bagi masyarakat (direktif). Fungsi ini dijalankan mengingat NW hadir di tengah masyarakat yang memiliki sejarah peradaban dan keberagaman yang panjang. Kedua fungsi ini dijalankan untuk menghindari konflik sosial di tingkat masyarakat dengan mempertimbangkan sejarah dan budaya terdahulu, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan perubahan-perubahan pada masa yang akan datang. Terjadi sinergi antara pemikiran sejarah dan pemikiran futuristik bagi masyarakat dengan dinamika kulturalnya.



Gambar 4. Sinergi ulama dan umara
(Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)

Tidak ada entitas kemanusiaan yang terjadi secara kebetulan, minimal entitas-entitas dimaksud menjadi ranah pemikiran masa tertentu berorientasi masa depan (futuristik), sebagaimana dilakukan Hamzanwadi. Beberapa di antaranya: pendirian Madrasah NBDI tahun 1943; formulasi substansi kurikulum madrasah (70% agama: 30% umum tahun 1951); dan berdirinya pendidikan umum pada satuan pendidikan dasar-menengah, hingga pendidikan tinggi sejak tahun

1970-an. Peristiwa sejarah era kemerdekaan ini menunjukkan adanya hubungan antara tanggung jawab penyediaan fasilitas pendidikan untuk kaum perempuan sebagai hak dasar kemanusiaannya sebagaimana ketentuan agama Islam). Juga menunjukkan sudah muncul pikiran futuristik bahwa kesetaraan antara peran gender antara laki-laki dan perempuan menjadi strategis dalam perjalanan sejarah peradaban kebangsaan di masa depan.



Gambar 5. Konteks konsolidasi
(Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)

Tidak ada pula yang menduga, pada tahun 1973 (pengakuan eksistensi madrasah) dan 1975 melalui SKB 3 Menteri: Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengakui madrasah sebagai bagian sistem Pendidikan Nasional, padahal Hamzanwadi sudah memikirkan dan melakukannya sejak tahun 1943. Bukti sejarah ini dimaknai sebagai habitualitas yang melahirkan aksi nyata dalam kurun tertentu yang memiliki kesinambungan dengan kecenderungan masa depan dalam tanggung jawab sebagai berkebangsaan.



Gambar 6. Situs Makam Pahlawan Nasional TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)

Pendidikan yang diinisiasi dan diinstitutionalisasi oleh Hamzanwadi adalah pendidikan dari dan oleh rakyat. Kehadiran awalnya sebagai khazanah individual yang dihajatkan sebagai instrumen penyadaran tentang kondisi kontekstual masyarakat pada masanya. Seluruh dokumen kebangsaan menyebutkan bahwa agenda pembangunan termasuk pendidikan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak dibatasi dengan entitas etnografis dan sosialnya. Karena itu, kehadiran NWDI sebagai lembaga pendidikan awal yang diperuntukkan bagi kaum pria dianggap belum memenuhi rasa keadilan untuk kemanusiaan melalui pendidikan. kehadiran NBDI menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan bagi kaum wanita untuk memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan melalui pendidikan. kehadiran NBDI adalah kesadaran universal tentang kesetaraan hak atas pendidikan bagi sesame, sehingga masing-masing dapat berkiprah dalam menjalankan tanggung jawab sejarah menuju kesejahteraan bersama sebagai tanggung jawab kebangsaan secara dinamis.

SIMPULAN

Hamzanwadi adalah sejarah objektif dalam konteks sejarah subjektif. Pikiran dan tindakannya dalam sejarah berkebangsaan Indonesia (kuantitas dan kualitasnya) tidak dapat disangkal dan nyata. Pikiran dan institutionalisasi, pergerakan kebangsaan diawali dari kancan lokal dengan cita-cita dan tujuan bersama, yakni Indonesia merdeka dan setara dengan peradaban bangsa lain. Konstruksi kesadaran dibangun melalui pendidikan dan mendirikan lembaga pendidikan. Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat strategis dalam kondisi sejarah masa itu di bawah politik etik kolonial. Buah dari pikiran dan institutionalisasi pergerakan kebangsaan membuah hasil dengan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Agenda kebangsaan tidak berhenti hingga Indonesia merdeka, tapi terus berlanjut dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan era moderan saat ini, dan seterusnya melalui pendidikan sebagai tanggung jawab sejarah secara terus menerus. Gelar Pahlawan Nasional yang dianugerahkan negara sehingga Hamzanwadi disebut Pahlawan Nasional pertama dari Nusa Tenggara Barat merupakan subjektif negara. Negara mengapresiasi kiprahnya dalam pergerakan kebangsaan Indonesia melalui pendidikan yang dimulai dari kancan lokal di Lombok Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos
- Bourdieu, P. (1986). "The Forms of Capital." Pp. 241-258 in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, edited by J. G.

- Richardson. New York: Greenwood Press. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, 241–258
<https://doi.org/10.1007/s11010-011-0831-4>
- Darmaji, A. (2014). Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer. *Refleksi*, 13(4), 469–494
<https://doi.org/10.15408/ref.v13i4.911>
- Fattah, A. D. (2017). *Dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia: Perjuangan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (1908-1997)*
- Fogg, K. W. (2019). Making an Indonesian National Hero for Lombok: The shifting category of pahlawan nasional. In *Indonesia and the Malay World* (Vol.47)
<https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1560710>
- Hauser, A. (1985). *The Sociology of Art*. Alfred A. Knopf: New York
- Heryanto, A. (2019). *Pasca-nasionalisme*. Retrieved from arielheryanto.wordpress.com
- Kartodirdjo, S. (2019). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (2nd ed.; S. Pusposaputro, ed.). Yogyakarta: Ombak
- Kementrian Agama RI. (2009). *Quran, Surat Az-Zaariyat, 56*. Jakarta: Sabiq
- Kuntowijoto, K. (2008). *Penjelasan Sejarah* (1st ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana
- Ratna, N. K. (2007). *Sastra dan Cultural Studies: Refrepresentasi Fiksi dan Fakta* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi, M. (2019). Wawasan Kebangsaan Prasyarat SDM Unggul. *Suaramerdeka.Com*, (May 2018), 2018–2021
Retrieved from <https://www.suaramerdeka.com/mcetak/baca/196410/wawasan-kebangsaan-prasyarat-sdm-unggul>
- Nahdi, K. (2013). Dinamika Pesantren Nahdlatul Wathan dalam Perspektif Pendidikan, Sosial, dan Modal. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 7(2)
<https://doi.org/10.15642/islamica.2013.7.2.381-405>
- Ricklefs, M. C. (1998). *A History of Modern Indonesia* (sixth; U. Press, ed.). Yogyakarta
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). *Teori sosiologi modern Alih Bahasa oleh Alimandan*. Publisher : Jakarta: Kencana
- Rosa, M. La, Salvetti, F., Bertagni, B., & Angeli, F. (2010). *Theories and researches*
- Said, E. W. (2017). *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan* (1st ed.; G. Visnawathan, ed.). Yogyakarta: Narasi
- Salim, A. (2002). *Perubahan Sosial* (First). Yogyakarta: PT Tiara Wacana